

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BAUBAU

La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 163 Malang

Email : agus.said36@yahoo.com

Abstrak: Dalam kebijakan pengelolaan persampahan Kota Baubau terjabarkan dalam sebuah program yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau ialah suatu program untuk meningkatkan kebersihan kota dari sampah, baik pada lokasi pemukiman, lokasi perkantoran maupun ruang publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan menggunakan model implementasi Edward III. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dalam hal komunikasi yang dijalankan internal Dinas Kebersihan bagi pelaksanaan program belum berjalan optimal. Ketersediaan sumber daya memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya ataupun tidaknya suatu kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau. Komitmen dari para pelaksana program terlihat memiliki rasa keluasaan yang besar untuk mewujudkan dan mensukseskan program. Serta pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan belum memiliki kejelasan standart yakni dengan penentuan standar operasional prosedur dalam mejalankan program.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Persampahan

Abstract : Waste policy of Baubau City accomodated a program run by the Local Department of Health. The program aimed to improve the cleanliness of the city from garbage, both in residential locations, the offices and public spaces. The research used qualitative methods to describe, and to analyze the program implementation development of waste management performance using a implementation model introduced by Edward III. The Research findings show that, the waste management performance in terms of internal communication executed by the Department of Health had not run optimally. The limited human resources gave major influence on the successful or failure of the policy implementtion of waste management in the City of Baubau. The commitment of almost all program managers sound good to make the program gained successful. Other inadequacies lied down at the standard operational procedures in determining the program worked out, and in handling.

Keywords : Public Policy, Public Implementation, Waste Management

PENDAHULUAN

Sampah menjadi suatu problema yang sangat pelik dalam suatu daerah perkotaan maupun pedesaan ketikaa sampah tidak teroganisir dengan baik. Dalam pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijelaskan secara rinci pada pasal 1 ayat 1 bahwa sampah terdiri atas (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis rumah tangga; (c) dan sampah spesifik. Serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 menjelaskan mengenai Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga, yang mendefinisikan bawah Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam upaya pemerintah, pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) pada pasal 2 menyatakan KSNP-SPP

digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Kebijakan tersebut mengintruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola persampahan yang memungkinkan terorganisirnya dengan baik melalui pencapaian pelaksanaan program menjadi ramah lingkungan.

Menurut BAPPENAS (2010) yang dikutip Suwerda (2012:3) mengungkapkan bahwa permasalahan utama di dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah. Kondisi ini menurut Bappenas disebabkan oleh lima faktor, antara lain : a) Masih belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan sampah; b) Penanganan sampah belum optimal; c) Minim pengelolaan layanan persampahan yang kredibel dan profesional; d) Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan sampah; e) Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan sampah.

Pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengelolanya, pembagian kewenangan ini secara langsung dilakukan pemerintah daerah baik pembiayaan serta proses penyediaan infrastruktur daerah yang diperlukan, tujuannya agar tercapainya efektifitas dengan dikeluarkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah, dan tingkat keseriusan pemerintah dalam melakukan penataan perkotaan. Harapan otonomi daerah bisa mandiri dalam proses pembangunan maupun pengelolaan persampahan sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat semata. Pada Prinsipnya Permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kota Baubau yang menjadi isu masalah diantaranya yakni pada tahun 2014 terjadinya peningkatan sampah hingga 323 kubik per hari. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan akan mengakibatkan melonjaknya sampah perkotaan. Jumlah penduduk Kota Baubau 142.576 jiwa memungkinkan tingkat perekonomian dan tingkat daya beli masyarakat yang semakin meningkat yang akan menyebabkan banyaknya sampah. Selain itu pula kurangnya sumber daya manusia yakni pasukan kuning, dengan sarana pengangkutan sampah yang ada dalam pelayanan pengangkutan selama yang dilakukan oleh dinas kebersihan dari 8 (delapan) kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan yang ada di Kota Baubau yang terlayani oleh dinas kebersihan pengangkutan pelayanan persampahan hanya 24 kelurahan saja, akan tetapi 19 kelurahan belum terakses pelayanan pengangkutan persampahan oleh Dinas Kebersihan.

Olehnya itu dalam rangka untuk mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah tentunya Kota Baubau mempunyai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan, serta mewujudkan realisasi Rencana Program Jangka Menengah Daerah 2013-2018, maka di jabarkan sebuah program rutin yang dilaksanakan Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran (KP3K) Kota Baubau, dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan kota dari sampah, baik pada lokasi pemukiman, hingga lokasi perkantoran maupun ruang publik. Tentunya daya tanggap pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Kebersihan sangat diperlukan sebagai salah satu pelaksana untuk mewujudkan pengelolaan persampahan dengan baik. Hal ini yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan menjadi suatu tuntutan untuk dilaksanakan demi tercapainya kebersihan pemukiman dan ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Hakekat penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep ataupun teori sesuai realita yang didapatkan di lapangan yang disesuaikan persoalan rumusan masalah yang diteliti bertujuan untuk dapat menemukan solusi berupa jawaban dan gambaran yang lengkap. Serta mengungkapkan

persoalan yang sifatnya tidak terekspos secara realita dalam hal upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Baubau terhadap pengelolaan persampahan.

Lokasi Penelitian dilakukan yakni Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran (KP3K) Kota Baubau. Serta sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan dan dokumen dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan dilakukan melalui empat kriteria yakni derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Langkah-langkah analisis data penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) Miles dan Huberman yang telah di kembangkan oleh Johnny Saldana (2014), yang memiliki tiga komponen utama antara lain : kondensasi data, penyajian data, dan menarik suatu kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai realitas implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau olehnya itu membedanya secara detail, peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III (1980) yang lebih dikenal dengan model pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dengan model proses implementasi yang terdiri dari empat variabel yakni komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resource*), disposisi (*diposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Komunikasi suatu organisasi suatu proses yang sangat kompleks dan pelik, komunikasi yang akurat harus dapat dimengerti secara cermat oleh para pelaksana kebijakan. Sumber informasi yang berbeda dapat dapat melahirkan interpretasi yang berbeda dalam konteks komunikasi. Agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif, perlunya adanya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan sesuai apa yang dihendaki. Keterampilan dalam berkomunikasi menjadi sangat penting untuk menjamin suatu pesan yang disampaikan agar tidak terjadinya distorsi informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan.

Dalam konteks program yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan dalam mengkomunikasikan kebijakan tentang penanganan kebersihan terkait dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, secara internal lingkup dinas tersebut berupaya melakukan komunikasi-komunikasi yang intens pada semua para bawahan yang terlibat dalam sukseksi sebuah program serta mengupayakan agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan. Terkhusus pada pegawai tetap mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program yang dijalankan untuk memanuver persoalan kebersihan lingkungan, tuntutan terwujudnya ramah lingkungan, dengan lahirnya sebuah program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan merupakan suatu kegiatan untuk menangani persoalan kebersihan pemukiman dalam kawasan Kota Baubau. Peran aktif dari pelaksana kegiatan sangat diharapkan untuk tata kelola kebersihan. Untuk itu perlukan pemahaman sistem komunikasi yang dijalankan dapat berjalan secara efektif kepada seluruh pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting untuk terciptanya suatu informasi yang lugas kepada pelaksana kebijakan. Akan tetapi komunikasi yang kurang optimal dan dipahami oleh para pelaksana kebijakan yakni para petugas pangkut sampah, hal ini terlihat dari hasil wawancara dalam penelitian sejauh ini masih mendapatkan kendala, tidak lain kendala tersebut yakni dari personal masing-masing yang belum memahami dan memenuhi tugas yang diberikan. Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi pelaksana kebijakan terhadap apa yang mereka harus lakukan dan kepatuhan terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa secara internal Dinas Kebersihan selalu berupaya terhadap suatu transmisi kejelasan yang diterima oleh para tenaga buruh saat ini. Pemahaman-pemahaman yang intens diberikan kepada tenaga

buruh pengangkut sampah, menjadi tanggung jawab internal lingkup dinas tersebut, agar hal ini mereka bisa memahami tujuan terhadap pekerjaan yang mereka laksanakan.

Dalam implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Dinas Kebersihan selalu melakukan koordinasi dengan beberapa instansi diantaranya yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Kota Baubau dan Dinas Pekerjaan Umum. Menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip Subarsono (2013:100) implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Dengan kata lain bahwasannya apabila suatu program dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan perlu dukungan dan kerjasama dengan instansi lain. Koordinasi yang dijalankan yakni mengkomodir pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kota Baubau serta penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan, pelayanan, pengangkutan kebersihan Dinas Kebersihan sendiri yang ambil ahli. Hal ini menandakan adanya suatu koordinasi yang dijalani dengan beberapa instansi sangat mendukung dalam pelaksanaan program dan menumbuhkan semangat kerja sama dalam menangani dan mengatasi persoalan persampahan di Kota Baubau.

Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Sumber daya yang dilihat *pertama* dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia Dinas Kebersihan Kota Baubau, lebih melihat pada aspek ketersediaan pelaksana program yaitu tenaga administrasi dan para tenaga buruh pengangkut sampah. Dari hasil pengamatan dari beberapa informan menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia, hal ini memungkinkan terjadinya pelayanan pengangkutan sampah dimasyarakat yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah. Sumber daya manusia menjadi modal utama untuk mendorong terwujudnya pelayanan kebersihan secara maksimal serta sebagai tolak ukur kekuatan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan adalah staf dan tenaga buruh pengangkut sampah. Menurut Agustino (2012) mengungkapkan bahwa keberadaan staf ialah sumber daya utama untuk mengimplementasikan kebijakan, kegagalan suatu implementasi karena disebabkan staf yang tidak memadai, dan tidak mempunyai keahlian. Satu hal yang perlu diingat bahwa jumlah staf/pegawai. selalu mempunyai dampak yang positif bagi implementasi sebuah kebijakan ataupun program. Pernyataan ini menandakan bahwa staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong lahirnya implementasi yang baik.

Kedua sumber daya yang dilihat kedua yakni sumberdaya finansial terkait dengan pembiayaan implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Baubau. Komitmen pemerintah dalam membiayai persampahan dituangkan oleh APBD Kota Baubau dukungan anggaran ini untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan. Pemerintah Kota Baubau biaya belanja langsung untuk bidang kebersihan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.761.186.500, Kekuatan anggaran atau dana tidak bisa dipungkiri hal tersebut merupakan faktor penentu dalam suatu pelayanan. Mazmania Daniel Sabatier dalam Subarsono (2014) mengungkapkan sumberdaya keuangan ialah faktor penentu untuk setiap sebuah program. Setiap program yang dijalankan sangat memerlukan dukungan anggaran maupun staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan memonitoring program kesemuanya itu membutuhkan biaya selanjutnya

Dalam kondisi di Kota Baubau dalam menangani persampahan bawsanya tersedianua sumber daya keuangan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sesungguhnya ketersediaan dana yang mencukupi untuk pembiayaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan akan memberikan dampak pada suatu pencapaian tujuan implementasi program. Selanjutnya *ketiga*, sumber daya dilihat dalam penelitian ini yaitu sarana persampahan, ketersediaan sumber daya lainnya untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan ialah sarana persampahan. Sebagaimana temuan data lapangan yang diperoleh bentuk dokumen ataupun wawancara, sarana persampahan di Kota Baubau masih ditemukan minim terkait dengan sarana angkut sampah akan tetapi bukan salah satu faktor penghambat implementasi program. Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan persampahan Kota Baubau dan melayani pengangkutan sampah masyarakat sesuai dengan data diantaranya : Truk sampah 18 unit, motor sampah 16 unit kondisi 2 unit rusak, container 26 unit, sampan sampah 2 unit, TPS 157 unit, Truck sampah 14 unit, Pick up sampah 1 unit, Komposter skala rumah tangga 15 unit, TPST 2 unit, Komposter komunal 1 unit, TPA 1 unit. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah ini menjadi memungkinkan pelayanan dilakukan secara maksimal dalam lingkup kawasan Kota Baubau. bahwa dukungan sarana persampahan yang ada di Kota Baubau minim jumlahnya, keberadaan sarana persampahan saat ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. walaupun jumlahnya masih kategorikan minim dalam pelayanan persampahan dilingkup kawasan Kota Baubau. Sehingga kondisi sarana yang ada saat ini, memungkinkan belum secara menyeluruh terlayannya akses persampahan di Kota Baubau, dengan jumlah dari 8 (delapan) wilayah kecamatan yang di Kota Baubau, hanya 24 kelurahan yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Baubau. Sehingga 19 kelurahan lainnya belum terlayani karena terbatasnya fasilitas pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Baubau, sehingga kebanyakan sampah yang tidak dapat diangkut diambil oleh masyarakat setempat untuk menanganinya. Menurut Edward III dalam Widodo (2012:102) menegaskan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Salah satu kurangnya sarana yang memadai dapat menunjukkan ketidاكلancaran implementasi kebijakan. Sebab kurangnya sarana akan memberikan dampak negatif terhadap sasaran program. Apabila sarana persampahan ditunjang dengan beberapa fasilitas yang memadai yakni sarana armada sampah dan kelengkapan lainnya maka dari beberapa wilayah kawasan yang ada di Kota Baubau akan terakses dan terlayani pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan.

Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Disposisi atau sikap pelaksana dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan merupakan suatu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sikap para pelaksana dalam program ini apabila mempunyai kemauan dan keinginan untuk melaksanakan program, maka sudah tentu pelaksanaan program akan efektif. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Jika pandangan dan sikap para pelaksana berbeda dengan tujuan yang akan dicapai maka proses pelaksanaan akan semakin jauh dari harapan untuk mensukseskannya. Kurangnya dalam intensitas disposisi ini, akan mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Guna melihat disposisi atau kecenderungan ini dapat dilihat melalui dampak dari suatu kecenderungan, pengangkatan birokrat dan insentif pada organisasi. Edward III yang dikutip Widodo (2012:104) jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Mengacu pada penelitian ini berdasarkan beberapa informan menunjukkan bahwa sikap para pelaksana program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan mempunyai komitmen bersama-sama mengawal dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan hal ini karena dilandasi dengan rasa kemauan dan keleluasaan yang besar untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini menjalankan pelaksanaan program mengacu kepada tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pelayan publik.

Komunikasi-komunikasi yang dijalankan bagi para pelaku program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan selalu konsisten dalam mewujudkan program.

Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Struktur birokrasi terkait dengan rentang dan kendali manajemen dan proses pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dapat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi. Struktur yang besar dengan jenjang hirarkis menjadi salah satu sebab lambatnya proses pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup organisasi karena banyak proses yang harus dilewati. Sebaliknya apabila dengan struktur yang sederhana akan memungkinkan percepatan terhadap suatu pekerjaan. Menurut Dennis H. Wrong yang dikutip Santosa (2009:10) mengungkapkan bahwa setiap organisasi birokratik mempunyai ciri struktural utama sebagai berikut : Pertama, pembagian tugas, kedua, hierarki otorita, ketiga, peraturan dan ketentuan terperinci, keempat, hubungan impersonal di antara pekerja. Ketepatan dalam menentukan sumber yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, niscaya akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Demikian sebaliknya, kekurangan sumber yang tidak tersedia dan di butuhkan oleh pelaku kebijakan, niscaya akan menyebabkan terjadinya kegagalan terhadap pelaksanaan kebijakan. Standart Operasi Prosedur (SOP) akan mempengaruhi tingkat disposisi kebijakan, semakin jelas standart operasi prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi terhadap hasil yang dicapai yang dilakukan oleh pelaku kebijakan. Mengacu pada penjelasan diatas bahwa dalam pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara beberapa informan mengungkapkan bahwa sejauh ini dalam pelaksanaan program belum mempunyai ketetapan Standart Operasi Prosedur (SOP), selama ini yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelaksanaan program melakukan pendekatan persuasif yang sifatnya instruksi-instruksi untuk melaksanakan pekerjaan, hal ini akan mengakibatkan dan menjadi kesulitan dalam menentukan keberhasilan suatu program.

Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Faktor pendukung yang *pertama*, Alokasi Anggaran Pengelolaan Persampahan. Salah satu faktor penunjang dalam pembiayaan pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau berasal dari APBD Kota Baubau. Anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 4.761.186.500, dari anggaran tersebut dengan rincian Rp. 3.858.189.500 digunakan untuk penanganan peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana dan biaya honorium bagi pasukan kuning untuk satu tahun. Alokasi kebijakan anggaran dari pemerintah Kota Baubau dalam rangka kelancara bagi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan searah apa yang dijelaskan Edward III dalam (Widodo, 2012) bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya anggaran yang diperlukan guna membiayai oprasionalitas pada pelaksanaan kebijakan. Jika para pelaksana bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan untuk diimplementasikan akan tetapi tidak didukung oleh sumber daya finansial maka pelaksanaan program/kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Faktor pendukung yang *kedua*, Sarana dan Prasarana Persampahan yang diidentifikasi oleh peneliti berdasarkan temuan dan wawancara, maupun dokumen sebagaimana dijelaskan sebelumnya yakni sarana persampahan/armada sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan untuk melakukan pengangkutan sampah di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Baubau. Walaupun masih dikategorikan minim jumlahnya akan tetapi para pelaksana program berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi agar tidak mengalami keterlambatan dalam pelayanan pengangkutan dalam pemukiman warga, walapun ada beberapa wilayah kecamatan yang akses pengangkutan lumayan jauh. Minimnya armada ini pula sebagian wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Baubau

belum terjangkau pelayanan pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Ketersediaan fasilitas baik sarana maupun prasarana sangat menentukan kelancaran sebuah program dalam tahap pelaksanaannya terutama penyelenggaraan kebersihan yang kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan kebersihan dan penanggulangan sampah. Seperti diungkapkan oleh Edward III dalam Widodo (2012) bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan yakni fasilitas sarana yang memadai. Dengan adanya fasilitas sarana yang memadai atau peralatan yang digunakan akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Faktor penghambat yang *pertama*, Rendahnya Kesadaran Masyarakat Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam prakteknya selalu membuang sampah pada bukan pada tempat yang disediakan oleh pihak Dinas Kebersihan. Menurut Husseel dalam Neolaka (2008:21) menyatakan kesadaran ialah suatu pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup sadar, bagian dari sikap dan perilaku. Pada kenyataannya perilaku hidup sadar oleh masyarakat belum sepenuhnya dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang kedisiplinan dan memahami terkait pemberitahuan dan membuang sampah bukan diluar tempat pembuangan dan pada jam-jam buangan sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan selalu dilakukan pemberitahuan baik melalui media lokal yang ada di Kota Baubau, akan tetapi hal ini tidak afektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi-informasi tersebut.

Faktor penghambat yang *kedua*, Sumber daya manusia (Pasukan Kuning),. menjadi tolak dalam pelaksanaan program/kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2012:98) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hanya saja sumber daya manusia untuk implementasi program sebagai faktor penghambat. Kurangnya sumber daya manusia dari hasil penelitian dan dan observasi, yakni kurangnya tenaga pasukan kuning yang berdampak yang melakukan pelayanan sampah kepada masyarakat. Walaupun sejauh ini pelaksanaan program terkait penanganan kebersihan Kota Baubau para pelaksana program selalu berupaya untuk memaksimalkan kerja mereka. Kekurangan dari petugas kuning ini menjadi tanggung jawab penting bagi dari Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau untuk mengupayakan tenaga tambahan terkait dalam pelaksanaan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya dapat disimpulkan, Dalam Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan yang dijabarkan sebagai sebuah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan oleh Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau melalui bidang kebersihan sebagai pelaksana program ialah sebuah program yang lahir untuk menjawab persoalan persampahan dan mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan meningkatkan kebersihan kota dari pemukiman hingga pada ruang publik di Kota Baubau. Dalam penjelasan implementasi kebijakan dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan untuk komunikasi yang di bangun oleh pihak dinas terkait khususnya para pelaksana program di Dinas Kebersihan belum terlaksana secara optimal, adapun ketersediaan sumberdaya yakni sumber daya manusia sejauh ini masih terbatas yang menjadi kendala dalam pencapaian pelaksanaan program yang berpengaruh pada tercapainya program. Hanya saja untuk sarana dan prasarana persampahan mendukung terlaksananya program yang dijalankan. Terkait komitmen dan kemauan para pelaksana program khususnya di dinas kebersihan Kota Baubau bersama-sama mengawal untuk mensukseskan pelaksanaan program. Untuk pengelolaan persampahan

yang dijabarkan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Baubau belum mempunyai standar yang jelas atau dengan kata lain dinas terkait belum merumuskan *standard operating procedures* (SOP), sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program. Hal ini dalam penanganan kebersihan cenderung menggunakan pendekatan persuasif yang sifatnya intruksi-intruksi kepada pelaksana program.

SARAN

1. Perlunya peningkatan komunikasi yang intens dan penyebaran informasi serta pengawasan antara implementor program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan agar wewenang pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.
2. Perlunya penambahan jumlah petugas sampah (pasukan kuning) karena sejauh ini minim jumlahnya, mengingat kawasan yang dilakukan kedepannya akan semakin luas dalam pelayanan pengangkutan persampahan di Kota Baubau.
3. Perlu meningkatkan biaya operasional dan pengadaan sarana yakni armada pengangkut sampah yang saat ini masih kategori minim dan belum menjangkau semua wilayah kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan persampahan di Kota Baubau.
4. Segera menyusun SOP (*Standart Operasional Prosedur*) mengenai kegiatan yang dikerjakan terkait program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan agar wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy*. First Edition. CQ Press USA.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Penerbit PT. Refika Aditama. Bandung.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah : (Kajian Teori dan Penerapan)*. Penerbit Pustaka Rihama. Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisi Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. C A P S Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.